

PERAN TEKNOLOGI DIGITAL, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN KREDIT PERBANKAN PADA KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Muhammad Akbar¹, Ratu Eva Febriani²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: akbarcena123@gmail.com^{1*}, ratuevafebriani@unib.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, kredit bank Umum, dan teknologi digital terhadap ketimpangan pendapatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel 34 Provinsi di Indonesia dengan kurun waktu 2018 – 2022. Model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Untuk pengujian secara ekonometrika dilakukan uji asumsi klasik, dan untuk uji hipotesisnya menggunakan uji-t, uji-f dan hasil koefisien determinasi (R²). Adapun hasil dari model REM menunjukkan bahwa kredit bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia, teknologi digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, akan tetapi pada variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Kredit bank Umum, Teknologi Digital, Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Pendapatan.

Abstract

This research aims to determine the influence of government spending, public bank credit, and digital technology on income inequality. The data used in this research is secondary data, the analysis method used is panel data regression for 34 provinces in Indonesia for the period 2018 - 2022. The model used is the Random Effect Model (REM). For econometric testing, the classical assumption test is carried out, and to test the hypothesis using the t-test, f-test and the results of the coefficient of determination (R²). The results of the REM model show that bank credit has a positive and significant effect on the level of income inequality in Indonesia, digital technology has a negative and significant effect on income inequality in Indonesia, but the government expenditure variable has no effect on income inequality in Indonesia.

Keywords: General bank credit, Digital Technology, Government Spending, Income Inequality..

Pendahuluan

Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada Negara Sedang Berkembang (NSB). Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, terus berlomba untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum fokus terhadap meratanya distribusi pendapatan. Ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 28 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

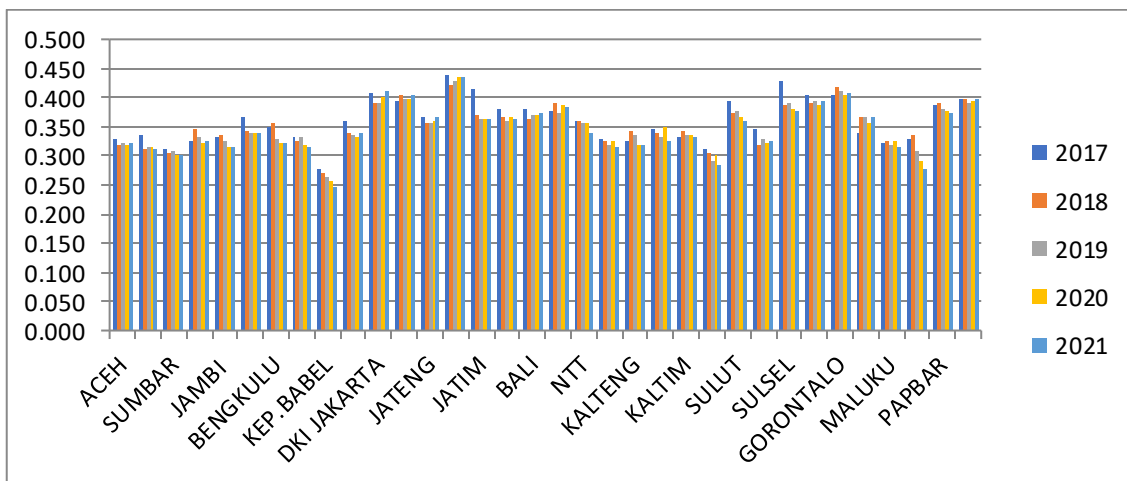
[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut (Y. Putri et al., 2015).

Menurut teori dari Simon Kuznets, distribusi pendapatan pada tahap awal pertumbuhan cenderung memburuk tetapi semakin lama ketimpangan pendapatan akan membaik seiring dengan berjalannya proses pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap selanjutnya (Todaro & Smith, 2011). Hal tersebut disebabkan karena pada proses pertumbuhan terdapat struktur ekonomi yang berubah berupa transisi dari yang awalnya didominasi sektor pertanian kemudian menuju ke sektor industri dan semakin lama berdampak terhadap peningkatan produktifitas tenaga kerja sehingga bisa mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan (Amri & Nazzamudin et al., 2018).



Gambar 1. Gini Ratio di Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber : BPS, 2024 (data diolah)

Permasalahan ketimpangan pendapatan antar pulau dan Provinsi di Indonesia mencerminkan adanya disparitas ekonomi yang signifikan di berbagai wilayah kepulauan. Di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan, memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi di pulau-pulau lain seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam infrastruktur, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta konsentrasi investasi dan industri di provinsi-provinsi di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2021).

Provinsi-provinsi di luar Jawa sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan peluang ekonomi, yang diperparah oleh kebijakan pembangunan yang cenderung lebih fokus pada pusat-pusat ekonomi di Jawa. Misalnya, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki tingkat pendapatan per

kapita yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Jawa, meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatera, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, juga tertinggal dalam hal pengembangan industri dan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat setempat (Benardin & Anitasari, 2023).

Akibatnya, meskipun Indonesia secara keseluruhan mengalami pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan antar pulau dan provinsi tetap tinggi, yang berdampak pada ketidakmerataan kesejahteraan dan potensi konflik sosial. Upaya untuk mengurangi ketimpangan ini memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan terarah, yang mendorong pembangunan ekonomi yang merata di seluruh provinsi Indonesia, termasuk investasi infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah yang kurang berkembang.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan isu krusial yang telah berlangsung lama dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan endogen menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan akumulasi modal dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Meiriza et al., 2023). Namun, jika manfaat ini tidak didistribusikan secara merata, hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan dan meningkatkan rasio Gini. Terjadinya perbedaan kondisi rasio Gini di beberapa provinsi pastinya tidak terlepas dari banyak faktor, salah satunya adalah peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Menurut (Todaro & Smith, 2003), teknologi berperan di dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, TIK berperan penting di dalam pembangunan suatu wilayah (Dewi et al., 2022). Peranan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian penting sejak lama (Romer, 1986), sebagai pencetus teori ekonomi endogen, menyatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mendorong investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan modal. Selain investasi, perkembangan teknologi juga berdampak pada alterasi budaya, terutama dalam ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan lantaran penggunaan teknologi yang cakup membutuhkan modal manusia yang berkualitas. Dengan demikian, penerapan teknologi dalam prosedur produksi dapat jadi lebih berpengaruh dengan sokongan modal manusia yang terampil (Lucya & Anis, 2019) dalam (Wijayanti, 2023)

Tingkat pembangunan TIK di daerah-daerah di Indonesia memiliki disparitas yang menciptakan ketimpangan dalam pembangunan TIK. Namun, harapannya adalah ketimpangan ini semakin berkurang sehingga pembangunan TIK dapat merata di seluruh Indonesia. Pembangunan TIK yang lebih maju diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah. Berdasarkan pengkajian yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik BPS (2020), delapan dari sepuluh daerah termasuk ke dalam kelompok daerah dengan perkembangan TIK yang relatif rendah. Daerah-daerah tersebut antara lain Aceh, Sumbar, Sumut, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Kep. Babel. Di sisi lain, Daerah Riau dan Kepri masuk

dalam kelompok daerah dengan pembangunan TIK yang relatif tinggi. Situasi ini berbanding terbalik dengan kelompok daerah di Wilayah Jawa di mana semua daerah masuk dalam kelompok daerah dengan pembangunan TIK yang relatif tinggi (Wijayanti, 2023).

Selanjutnya, aspek, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif (Febriani et al., 2023; Florennica & Febriani, 2023; Laut et al., 2020). Terkait dengan upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan, beberapa provinsi di Indonesia selalu mengalami kemiskinan yang tinggi, ternyata belanja pemerintah daerah di Pulau Sumatera lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, padahal peningkatan jumlah daerah otonom di Indonesia terbesar terjadi di Pulau Sumatera (Setyo & Anggraini Rambe, 2024). Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), salah satu langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yaitu melalui percepatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan lapangan kerja agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Lapangan pekerjaan yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun kenyataannya pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan masalah ketimpangan pendapatan yang stabil. Padahal pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pengeluaran pemerintah minim maka dapat memperlambat perekonomian dan konsumsi rumah tangga menurun (D. T. Putri et al., 2018). Beragam faktor dapat menyebabkan fluktuasi tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia, meskipun pengeluaran pemerintah meningkat setiap tahun, salah satunya adalah alokasi dari pengeluaran pemerintah itu sendiri. Jika alokasi pengeluaran pemerintah dilakukan secara tepat dan merata, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, jika alokasi pengeluaran tidak sesuai dengan target, maka dampaknya bisa merugikan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kredit bank juga memiliki peran penting dalam menentukan distribusi pendapatan. Akses yang mudah terhadap kredit dapat mendorong aktivitas ekonomi, memungkinkan individu dan usaha kecil untuk tumbuh dan meningkatkan pendapatan mereka (Lestari et al., 2022; Nopiah et al., 2024). Namun, jika akses kredit hanya tersedia untuk kelompok tertentu, hal ini dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi cara-cara mengoptimalkan sistem perbankan dan kebijakan kredit guna mendukung inklusi finansial. Penelitian yang dilakukan oleh (C.-Y. Park & Mercado, 2015), menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara inklusi finansial dan ketimpangan pendapatan. Ini berarti bahwa peningkatan inklusi finansial dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang di Asia (Khoiriyah & Amalia, 2023). Perbankan melalui aktivitas kredit memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di negara

berkembang termasuk Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran kredit perbankan. Untuk negara yang memiliki pasar modal yang belum begitu berkembang, kredit perbankan efektif mempengaruhi perekonomian (Setiawan, 2020).

Adapun naiknya tingkat ketimpangan pendapatan juga karena terbatasnya akses ke layanan keuangan (D. Park & Shin, 2015). Terbatasnya akses ke layanan keuangan menyebabkan masyarakat akan kehilangan peluang untuk mendapatkan bantuan kredit yang bisa membantu usaha mereka tumbuh dan menguatkan ketahanan ekonomi di masa-masa krisis (Angelina et al., 2018).

Pada era pembangunan berkelanjutan saat ini, perbankan sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada pertanyaan mendasar, yaitu, peranannya terhadap ketidakmerataan pendapatan. Beberapa studi empiris menemukan hal yang berbeda tentang dampak pembangunan sektor finansial terhadap ketidakmerataan pendapatan. Di satu sisi, terdapat temuan bahwa pembangunan sektor finansial dapat menurunkan ketidakmerataan pendapatan, di sisi lain ditemukan bahwa ada indikasi ketidakberpihakan sistem finansial. Ketidakberpihakan ini disebabkan sistem finansial hanya memberikan manfaat bagi pihak yang tergolong kaya, sedangkan pihak lain tidak (Priyono et al., 2019).

Secara teoritis, perkembangan dalam intermediasi finansial dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Greenwood (1990) menyatakan bahwa mekanisme pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi melalui peningkatan dari tingkat pengembalian atas modal (rate of return of capital), atau dengan kata lain investasi semakin efisien. Demikian sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat membantu pengembangan sektor finansial. Namun demikian, jika stimulus finansial terhadap efisiensi investasi terjadi pada tahap awal pembangunan, perekonomian cenderung tumbuh dengan lambat. Seiring dengan semakin tingginya tingkat pendapatan, jika hal ini terus berlanjut maka perkembangan finansial akan semakin cepat dan luas sehingga perekonomian pun semakin berkembang pesat. Saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara orang kaya dengan orang miskin. Hal ini mengikuti pola hubungan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi *Kuznet Curve*.

Greenwood & Javanovic (1990) menemukan bahwa pembangunan finansial hanya memberikan manfaat bagi kaum kaya dikarenakan tingginya biaya intermediasi. Pada periode berikutnya, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan ditemukan menurun.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperkaya khasanah keilmuan dan juga mengisi research gap terkait perkembangan teknologi digital, pengeluaran pemerintah, kredit perbankan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Adapun runtutan penulisan berupa bab I yang terdiri dari latar belakang, bab 2 membahas landasan teori, bab 3 menguraikan metode penelitian, bab 4 berupa hasil penelitian, dan ditutup pada bab 5 yang berisi Kesimpulan dan saran.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rangkaian data sekunder berupa tahun 2018-2022 dari website resmi Badan Pusat Statistik. Selain data dari BPS, data sekunder juga didapatkan melalui website resmi DJPK dan BI. Penelitian ini menggunakan model regresi dengan ketimpangan pendapatan pada tahun sebelumnya sebagai variabel dependen (lag 1 tahun). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah, kredit bank umum, dan IP-TIK. Metode analisis yang diterapkan pada penelitian ini ialah regresi data panel. Guna menetapkan model regresi data panel yang paling tepat (CEM, FEM, atau REM), analisis dilakukan dengan menerapkan uji Chow dan Hausman pada temuan penelitian ini. Uji asumsi klasik seperti multikolinearitas dan heteroskedastisitas juga dilaksanakan. dengan menggunakan alat Eviews 12.

Adapun model persamaan regresi dapat disajikan pada persamaan berikut :

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 KBU_{it} + \beta_3 IPTIK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

- KP : Ketimpangan Pendapatan (Y)
- PP : Pengeluaran Pemerintah (X1)
- KBU : Kredit Bank Umum (X2)
- IPTIK : Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (X3)
- i : Daerah (*cross section*)
- t : Tahun (*time series*) periode tahun 2018 - 2022
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
- μ : *Error term*

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan CEM, FEM, dan REM guna menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui serangkaian pengujian:

Tabel1. Hasil Uji Chow

Effect Test	statistic	d.f	Prob
Cross-section Chi Square	502.057406	33	0.000

Sumber: Eviews 12, 2024 (data diolah)

Hasil uji Chow mengindikasikan adanya perubahan struktur model regresi secara signifikan antar periode. Nilai probabilitas *chi-square* yang sangat kecil (0,000) memberikan bukti kuat untuk menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, FEM adalah model terbaik dalam uji Chow.

Tabel2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-sq. sTastistik	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-Section Random	4.100.767	3	0.2508

Sumber: Eviews 12, 2024 (data diolah)

Analisis Uji Hausman menunjukkan bahwasanya tidak ada komparasi yang signifikan antara estimator MEA dan REM. Oleh karena itu, REM dipilih sebagai model yang lebih tepat untuk data penelitian ini. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai probabilitas *cross-section* random sebesar 0,2508.

Tabel3. Hasil Lagrange Multiplier

	Cross section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch- Pagan	0.000	0.6845	0.0000

Sumber: Eviews 12, 2024 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik, REM terpilih sebagai model yang paling tepat. Nilai probabilitas yang sangat kecil (0,0000) pada uji Chow, Hausman, dan LM mengindikasikan bahwa hipotesis nol ditolak, sehingga mendukung penggunaan model REM.

Uji Asumsi Klasik

Studi ini memakai uji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable.	Constanta	Koe.fisie.n	Std. E.rror	Prob.
C	0.025157	0.011453	2.196650	0.000
X1	-1.23E-07	1.28E-07	-0,960009	0.3384
X2	-1.61E-08	1.59E-08	-1.010175	0.3139
X3	0.001847	0.001930	0.956826	0.3400

Sumber : Data diolah, 2024

Dari hasil heteroskedastisitas, diperoleh nilai prob X1 0,3384 > 0,05, nilai prob X2 0,3139 > 0,05 dan nilai prob x3 0.3400. Diketahui bahwa nilai probabilitas pada setiap variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel5. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000.000	0.643495	0.107677
X2	0.643495	1.000.000	0.470546
X3	0.107677	0.470546	1.000.000

Sumber : Data diolah, 2024

Dari hasil uji multikolinearitas, diperoleh koefisien korelasi X1, X2 dan X3 < 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Hasil ini mengindikasikan tidak adanya korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen, sehingga tidak menimbulkan masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dipenelitian ini terdiri dari Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R²). Melalui pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan program E-Views 12.

Hasil Uji t

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah hipotesa nol yang disusun dengan batas $\alpha = 0,05$ dapat terjawab. Dari hasil perhitungan t statistik, diperoleh nilai t-Statistic variabel Pengeluaran Pemerintah (X1) sebesar: -0.671 dengan prob. 0,5028, maka dapat disimpulkan meski arah hubungan negatif, tapi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pada provinsi di Indonesia. Sementara itu, Kredit bank (X2) terbukti mampu mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada provinsi di Indonesia secara positif dengan prob. 0.0039. Lebih lanjut, Teknologi Digital (X3) berpengaruh negatif signifikan pada taraf $\alpha=5\%$ terhadap Ketimpangan pada provinsi di Indonesia.

Tabel6. Hasil Uji t

Variable.	Constanta	Koe.fisie.n	Std. E.rror	Prob.
C	0.429435	0.013777	3.117.065	0.000
X1	-1.18E-07	1.75E-07	-0,671502	0.5028
X2	6.83E-08	2.34E-08	2.923.435	0.0039
X3	-0.015260	0.002176	-7.014.162	0.000

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil Uji f

Tabel7. Hasil Uji F

Komponen	Nilai
F-statistic	1.692094
Prob. (F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah, 2024

Nilai f tabel sebesar 16.92094 lebih besar daripada f hitung sebesar 2.659052. Selain itu, nilai signifikan 0.00000 lebih rendah daripada 0.05. Ini memberikan petunjuk bahwasanya variabel ini memengaruhi tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Estimasi Random Effect Model

R-square.d	0.234186
Adjusted R-squared	0.220346
F-statistic	1.692094
Prob. (F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah, 2024

Nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.234186 atau 23%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pengeluaran Pemerintah, Kredit Bank Umum, dan Teknologi mampu menjelaskan variabel tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 23,4186%, sedangkan sisanya yaitu 76% (100 – nilai adjusted R-Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

$$Y = 0.429 - 1.18 * X_1 + 6.83 X_2 - 0.015 X_3$$

Analisa nilai koefisien regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Nilai koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar -1.18 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah 1 miliar menyebabkan penurunan ketimpangan sebesar 1.18.

Nilai koefisien regresi Kredit bank sebesar 6.83 menunjukkan hubungan positif yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan Kredit bank 1 miliar menyebabkan kenaikan ketimpangan sebesar 6.83.

Nilai koefisien regresi Teknologi Digital sebesar -0.015 menunjukkan hubungan negatif yang memberikan arti bahwa setiap kenaikan Teknologi digital 1 menyebabkan penurunan ketimpangan sebesar 0.015.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah berperan sebagai katalisator dalam pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada penurunan ketimpangan pendapatan (Sujidno & Febriani, 2023). Akan tetapi, hasil estimasi dengan model Random Effect Model (REM), menunjukkan koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah sebesar -1.18 dan probabilitas 0.5028. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Laut et al., (2020), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa. bentuk alokasi belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mempengaruhi terjadinya kesenjangan pendapatan, dimana belum meratanya pembangunan dan tidak terserapnya tenaga kerja yang dapat menambah pendapatan masyarakat.

Tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan dimungkinkannya oleh banyak faktor yang menghambat efektivitas kebijakan ini di Indonesia. Salah satunya dikarenakan pengeluaran pemerintah belum efisien. Hanya pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien sajalah yang mampu

menyediakan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Febriani & Rambe, 2022). Desain kebijakan yang kurang tepat, seperti sasaran yang tidak jelas, kriteria penerima yang tidak transparan, Efektivitas Program Pemerintah, ketergantungan pada sektor formal dan alokasi pengeluaran pemerintah yang sering kali tidak merata. Di Indonesia, pengeluaran pemerintah cenderung terfokus pada daerah-daerah tertentu, terutama di Pulau Jawa, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan. Sementara itu, provinsi di luar Jawa, seperti Papua dan Sumatera, sering kali menerima alokasi yang lebih rendah meskipun mereka memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketidakmerataan ini menyebabkan disparitas dalam akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah dalam merancang kebijakan pengeluaran untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Temuan ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2023) yang Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia 2015-2019. Berdasarkan penelitian Fithrian et al., (2015), pengeluaran pemerintah memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, yang dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Namun, jika pengeluaran pemerintah tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, hal ini justru dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan (Danawati et al., 2016).

Lapangan pekerjaan yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Namun kenyataannya pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan masalah ketimpangan pendapatan yang stabil. Padahal pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, apabila pengeluaran pemerintah minim maka dapat memperlambat perekonomian dan konsumsi rumah tangga menurun (R. P. Putri et al., 2018).

Pengaruh kredit bank umum terhadap ketimpangan

Dari hasil Regresi Random effect model (Rem), menunjukkan koefisien dari variabel tingkat pendidikan sebesar 6,83 dan probabilitas 0.039. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kredit bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Balaka (2007), yang menemukan bahwa jumlah kredit mikro memiliki efek positif pada pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tenggara. Dengan kata lain, semakin banyak kredit mikro yang diberikan, semakin tinggi angka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pinjaman Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi sangat berperan dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi usaha mereka,

mengembangkan bisnis, serta memenuhi kebutuhan konsumsi. Dengan meningkatnya produksi dan skala usaha, kebutuhan akan tenaga kerja juga bertambah, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wulandari & Sipahutar, 2021), yang menunjukkan bahwa pemberian kredit bank di Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan serta pengurangan tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Kredit bank umum dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat atau memperlemah ketimpangan pendapatan dalam suatu perekonomian. Di satu sisi, akses terhadap kredit yang lebih baik dapat mendorong pertumbuhan usaha, terutama bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini berpotensi mengurangi ketimpangan pendapatan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, di sisi lain, jika penyaluran kredit lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi, maka ketimpangan pendapatan justru akan semakin melebar. Selain itu, tingginya suku bunga kredit dapat menjadi beban bagi usaha-usaha kecil yang kesulitan mengakses sumber pendanaan alternatif, sehingga memperlambat pertumbuhan mereka dan memperbesar jurang pendapatan dengan kelompok masyarakat yang lebih kaya.

Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil Regresi *Random Effect Model* (REM), menunjukkan koefisien dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0.015260 dan probabilitas 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Teknologi Digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan eksogen yang diajukan oleh Solow-Swan dalam penelitian (Wijayanti et al., 2023), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja dalam aktivitas produksi (Juhro & Trisnanto, 2021). Penelitian lain oleh (Khan et al., 2020) juga menunjukkan bahwa perkembangan TIK di 28 negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, negara-negara dengan perkembangan TIK yang lebih maju cenderung mengalami tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Pratama & Titik (2024) dalam penelitiannya memberikan hasil uji bahwa dalam jangka panjang variabel teknologi finansial dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di ASEAN, beragam inovasi keuangan yang di sediakan dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat melalui internet maupun telepon seluler. Maharani Putri Dian et al. (2023) juga mengemukakan bahwa peran digital terhadap pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh, melalui aktifitas pembayaran digital akan mempercepat proses kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu mengurangi jarak pendapatan antar

penduduk.

Teknologi memiliki potensi besar untuk memperlebar atau mempersempit jurang kesenjangan digital. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi katalisator bagi pemerataan akses informasi dan peluang ekonomi. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang kerja yang lebih luas. Keterbatasan akses terhadap perangkat, infrastruktur internet yang tidak merata, dan *digital divide* yang masih signifikan di banyak wilayah dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam era digital. Selain itu, otomatisasi dan kecerdasan buatan yang semakin canggih juga berpotensi menggeser lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan rendah. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kesempatan kerja dapat semakin melebar.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Implementasi kebijakan yang kurang efektif seperti sasaran kebijakan yang tidak jelas, kriteria penerima yang tidak transparan dan program yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menjadi penghambat pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan yang ada di Indonesia. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap ketimpangan, seperti Kredit bank memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia, serta teknologi digital yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan dengan adanya kemajuan teknologi digital dapat meningkatkan tenaga kerja dalam aktivitas produksi yang nantinya akan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Besaran koefisien dari seluruh variabel dapat diketahui dari hasil R^2 , yang menunjukkan nilai sebesar 23,4186%. Sementara itu, sisa 76,5814% adalah hasil dari variabel tambahan yang tidak dimasukkan dalam model temuan ini.

Saran

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah membuat kebijakan di Indonesia yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Memperluas akses kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah terpencil dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan perbankan harus mendukung inklusi finansial agar lebih banyak individu dan usaha kecil dapat memanfaatkan fasilitas kredit. Mendorong pembangunan TIK di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan perkembangan yang rendah, dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi baru. Peneliti berikutnya yang mengkaji ketimpangan pendapatan diharapkan memperluas objek dan variabel penelitian, agar mampu menyajikan hasil yang lebih menyeluruh mengenai fenomena ketimpangan pendapatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K., & Nazamuddin. (2018). Is There Causality Relationship Between Economic Growth and Income Inequality?: Panel Data Evidence From Indonesia. *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8–20. <https://doi.org/10.15604/ejef.2018.06.02.002>
- Anugra, R., Marwa, T., & Imelda, I. (2019). Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 31–40. <https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8773>
- Asmaiyah, N., & Nugroho, R. Y. Y. (2022). Peran Pengembangan Sektor Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2011-2019. *Journal of Applied Business andn Economic (JABE)*, 8(3), 366–375.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah.
- Benardin, Benardin; Anitasari, M. (2023). Pengaruh Dana Desa dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan antar Pulau Jawa dan Sumatera. *CONVERGANCE: The Journal of Economic Development*, 5(2), 168–179.
- Danawati, S., Bandesa, I. K. G., & Utama, M. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Univeristas Udayana*, 5(7), 2123–2160.
- Dewi, D. M., Setiadi, Y., Ikhwanuddin, M., & Fadhilah, L. A. (2022). Kontribusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Kelompok Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 221–242. <https://doi.org/10.21002/jepi.2022.13>
- Febriani, R. E., & Rambe, R. A. (2022). Government revenue and spending nexus in regional Indonesia: Causality approach. *Economics, Management and Sustainability*, 7(1), 34–42. <https://doi.org/10.14254/jems.2022.7-1.3>
- Febriani, R. E., Rambe, R. A., Yusnida, Y., & Indraswanti, B. I. E. (2023). Measurement of Productivity of Local Government Spending in Poverty Alleviation (Issue Bicemba). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-328-3_24
- Fithrian, M., Syechalad, N., & Nasir, M. (2015). Analisis pengaruh agregat demand dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 23–32.
- Florennica, E., & Febriani, R. E. (2023). Do Financial Deepening, Government Spending, and Unemployment Benefit Poverty Reduction in Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 193–204. <https://doi.org/10.29259/jep.v20i2.18610>

- Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>
- Juhro, S. M., & Trisnanto, B. (2021). Paradigma dan Model Pertumbuhan Ekonomi Endogen Indonesia (Endogenous Paradigm and Growth Model for Indonesian Economy). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3787174>
- Khan, N., Ismail, S., Kazim, R., & Azam, T. (2020). The Influence of Information Communication Technology Development on Income Inequality. *Artech Journal of Current Business and Financial Affairs (AJCBFA)*, 1(1), 11–18.
- Khoiriyah, D. N., & Amalia, F. (2023). Dampak inklusi dan literasi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan melalui kredit UMKM di Indonesia tahun 2016 dan 2019. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 16. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i1.6303>
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh Pma, Pmdn, Tpak, Pdrb Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(2), 21–34. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781>
- Lestari, R. M., Febriani, R. E., & Putri, N. T. (2022). Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Sumatera. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 3(2), 179–195. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v3i2.22388>
- Maharani Putri Dian, Romiza Naziha, Irfan Syauqi, & Febriani Eva Ratu. (2023). Impact of Digital Payment on Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Bicemba*, 1(1), 228–234.
- Meiriza, M. S., Marpaung, D. T., Limbong, N., Wulandari, S., Tarigan, B., & Medan, U. N. (2023). Analisis Ekonomi Neo Klasik Terhadap Perkembangan Ekonomi Menurut Robert Solow Dan Trevor Swan. 5(4), 4.
- Nopiah, R., Pasaribu, E., & Febriani, R. E. (2024). How Microcredit Programs Improve Business Household Well-being in the Local Economy? An Impact Evaluation. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 51–64. <https://doi.org/10.29259/jep.v22i1.23074>
- Park, C.-Y., & Mercado, R. J. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. *SSRN Electronic Journal*, 426. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2558936>
- Park, D., & Shin, K. (2015). Economic Growth, Financial Development, and Income Inequality. *ADB Economics Working Paper Series*. 442, 1–46.

- Pratama, Y. Y., & Titik, C. S. (2024). Pengaruh Teknologi Finansial dan Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara ASEAN-6. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 24. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v11i1.47003>
- Priyono, A. F., Pitriyan, P., Heriyaldi, H., & Maipita, I. (2019). Credit Expansion and Its Impact on Income Inequality of the Provinces in Indonesia. *Jurnal Economia*, 15(1), 82–95. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23710>
- Putri, D. T., Azwardi, A., Marwa, T., & Andaiyani, S. (2018). Does Government Spending Drive Regional Economic Growth? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 261–265.
- Putri, D. Y., & Aminda, R. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Of Development Economic and Digitalization*, 3(1), 87–108.
- Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 95–104. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625>
- Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 102918.
- Romer, P. M. (1986). *The Origins of Endogenous Growth*. American Economic Association.
- Setyo, S., & Anggraini Rambe, R. (2024). Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Aceh. *Media Ekonomi*, 31(2), 207–218. <https://doi.org/10.25105/me.v31i2.18313>
- Shalihah, H. F., & Febriani, R. E. (2023). Democracy and Government Spending : Is There a Link? *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 949–960. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3463>
- Sujidno, R., & Febriani, R. E. (2023). Pengaruh Korupsi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(2), 205–220. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.202>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (edisi kede). Jakarta : Erlangga , 2003.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. In Erlangga (ed. 11, ji, p. 518). Jakarta : Erlangga, 2011.
- Tri Putri, N., Agustina Ekaputri, R., Eva Febriani, R., Pembangunan, E., *Ekonomi*

- dan Bisnis, F., & Bengkulu, U. (2023). Ketimpangan Produktivitas Tenaga Kerja Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Bengkulu. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 5(1), 14–28.
- Wahyudi, W. (2023). Pengeluaran Pemerintah Provinsi Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sebatik*, 27(2), 708–715. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369>
- Wijayanti, N. N. A., Ratih, A., Usman, M., Aida, N., & Ciptawaty, U. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Periode Tahun 2018-2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 245–265.
- Wulandari, D., & Sipahutar, M. A. (2021). Pengaruh Loan To Deposit Ratio Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Return On Asset. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(1), 107–114. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i1.493>